



TRANSPARANSI

PARTISIPASI

INOVASI

AKUNTABILITAS

Penyiapan Penyusunan Eol Local OGP

Darwanto
Sekretariat CSO – Open Government Partnership Indonesia



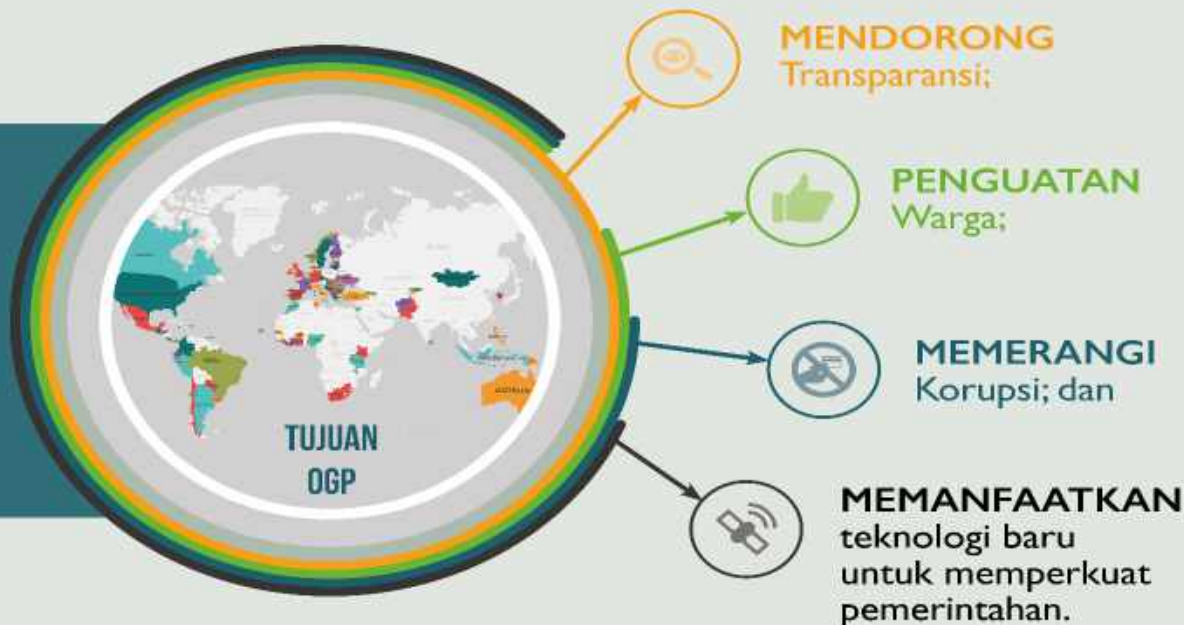
Open Government Partnership ?

- Platform multipihak internasional
- Didirikan pada 2011 oleh 8 negara: Indonesia, Brazil, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Filipina, Norwegia, Meksiko, Inggris. Kini beranggotakan 78 negara
- Mendorong pemerintah untuk makin terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap warga
- Dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat sipil
- Indonesia saat ini menjadi SC Pemerintah untuk ketiga kalinya



Tujuan OGP?

Open Government Partnership (OGP) bertujuan mendapatkan komitmen nyata dari pemerintah kepada warganya untuk:





PRINSIP Kelembagaan dan Tata Kelola OGI



Kesetaraan

Kemitraan setara yang sungguh-sungguh (*genuine partnership*) menjadi prinsip penting dalam Open Government Indonesia (OGI). Prinsip ini harus tercermin dalam struktur, hak dan kewajiban dalam pengambilan keputusan dan mekanisme pengambilan keputusan.



Keterbukaan

Segala bentuk pertemuan dalam OGI harus berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Kalau pun terpaksa harus tertutup karena terkait dengan pengecualian Pasal 17 UU KIP, maka hasil dari rapat tersebut harus tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.



Co-creation

Open government adalah semangat untuk merancang dan melaksanakan bersama antara *stakeholders* kunci pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan itu, rencana aksi OGI akan lebih inovatif, transformatif dan memecahkan masalah. *Co-creation* artinya memastikan bahwa proses penyusunan substansi dilakukan secara partisipatif.



Akuntabilitas

Mekanisme kerja dan pengelolaan OGI harus menunjukkan kejelasan bentuk dan proses pertanggung jawaban atas setiap keputusan dan tindakan organisasi. Tata aturan organisasi juga harus secara spesifik mengatur pengurangan risiko penyalahgunaan wewenang dan pencegahan potensi konflik kepentingan.



Teori Perubahan

- Aktor & Pelopor
- Inisiatif / Inovasi
- Dukungan Politik
- Ruang Kolaborasi / Keterlibatan



SIAPA SAJA Terlibat dalam OGI?



Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga

Setiap Pemerintah Daerah/ Kementerian/ Lembaga yang sudah menyerahkan surat pernyataan, berkomitmen pada seluruh prinsip dan proses *Open Government Partnership (OGP)* dengan mendukung Deklarasi Pemerintah yang Terbuka, dan sudah mengawali proses penyusunan rencana aksi, dianggap sebagai pemerintah daerah yang berpartisipasi dalam *Open Government Indonesia (OGI)*.



Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil bisa berkontribusi dalam OGI dengan mengajukan pencalonan sebagai anggota SC; terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi di level negara; dan ambil bagian dalam Konferensi Dua Tahunan OGP dan agenda-agenda OGI lainnya.



Sektor Swasta

OGP mendorong sektor swasta untuk ambil bagian dalam menyusun, mengawasi dan mendukung pelaksanaan rencana aksi negara melalui partisipasi dalam forum multipihak dan konsultasi publik di negaranya, serta melalui pemberian bantuan teknik. Organisasi sektor swasta juga dapat diundang untuk berpartisipasi dalam Konferensi Dua Tahunan OGP dan agenda-agenda OGP lainnya.



Pengamat OGP

Perwakilan dari organisasi internasional dan lembaga antarpemerintah yang relevan dapat diundang sebagai pengamat oleh SC untuk menghadiri Konferensi Dua Tahunan OGP dan agenda SC lainnya.



KOMITMEN MEWUJUDKAN 5 HARAPAN

Semua Pemerintah Daerah/ Kementerian/
Lembaga yang ikut serta dalam *Open
Government Partnership (OGP)* berkomitmen
untuk mencapai lima harapan utama, yaitu:



MENDUKUNG

Deklarasi Pemerintahan yang Terbuka;



MEMBUAT

komitmen nyata, sebagai bagian dari
rencana aksi negara, yang ambisius
dan melebihi pencapaian yang sudah
ada di negara tersebut;



MENGEMBANGKAN

rencana aksi melalui proses yang
melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, dengan keterlibatan aktif
dari warga dan masyarakat sipil;



BERKOMITMEN

pada evaluasi diri dan pelaporan
independen tentang kemajuan yang dicapai;



BERKONTRIBUSI

pada kemajuan pemerintah yang terbuka di
negara lain dengan berbagi praktik terbaik,
bantuan teknis, teknologi dan sumberdaya,
jika dibutuhkan.

Open Government Berdampak pada Penguatan Pembangunan Ekonomi



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA



Transparansi
Pemerintah dapat
meningkatkan
efisiensi bisnis dan
mendorong
pertumbuhan
ekonomi

Keterbukaan data menghasilkan nilai ekonomis dan memperluas lapangan pekerjaan

Transparansi fiskal dan prosedur administrasi meningkatkan iklim investasi

Transparansi pengadaan barang/jasa menghasilkan akses pasar yang terbuka bagi pelaku usaha, terutama UMKM

***Bagaimana Implementasi OGP
daerah (subnasional)
di dunia maupun Indonesia?***



SUBNASIONAL
(KABUPATEN/KOTA)
YANG SUDAH
BERGABUNG OGP

NO	KOTA/KABUPATEN, NEGARA	BERGABUNG TAHUN
1	Austin, United States	2016
2	Basque Country, Spain	2018
3	Bojonegoro, Indonesia	2016
4	Buenos Aires, Argentina	2016
5	Elgeyo Marakwet, Kenya	2016
6	Iasi, Romania	2018
7	Jalisco, Mexico	2016
8	Kaduna State, Nigeria	2018
9	Kigoma, Tanzania	2016
10	La Libertad, Peru	2016
11	Madrid, Spain	2016
12	Nariño, Colombia	2018
13	Ontario, Canada	2016
14	Paris, France	2016
15	São Paulo, Brazil	2016
16	Scotland, United Kingdom	2016
17	Sekondi-Takoradi, Ghana	2016
18	Seoul, South Korea	2016
19	South Cotabato, Philippines	2018
20	Tbilisi, Georgia	2016



PEMERINTAH DAERAH
INDONESIA
YANG MENERAPKAN OGP

PEMERINTAH
KABUPATEN
BOJONEGORO

BERGABUNG DALAM INISIATIF OGP
PADA TAHUN 2016

Memiliki komitmen renaksi
sebanyak 4 renaksi.



Revolusi Data.

Pengembangan data real time terintegrasi yang dikumpulkan oleh Aplikasi Data Dasa Wisma (kelompok 10 rumah tangga di tingkat desa dan kecamatan / perkotaan).



Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Bertujuan agar administrasi desa terbuka dan bertanggung jawab serta adanya pembangunan kapasitas masyarakat desa.



Meningkatkan Transparansi Anggaran Pemerintah Daerah (APBD).



Perbaiki Keterbukaan Data Kontrak Pengadaan (Dokumen Kontrak).

PEMERINTAH DAERAH
INDONESIA
YANG MENERAPKAN OGP

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BERGABUNG DALAM INISIATIF OGP
PADA TAHUN 2016

4
KOMITMEN
RENCANA AKSI



Penguatan Pejabat Pengelola
Infomasi dan Dokumen (PPID)



Mekanisme pelaporan
keluhan public yang terhubung dengan
LAPOR!



Transparansi Data
Pemerintah Kota



Mempermudah layanan public
dengan berbagai pengembangan aplikasi

AUSTRALIA



PEMERINTAH DAERAH
INDONESIA
YANG MENERAPKAN OGP

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BERGABUNG DALAM INISIATIF OGP
PADA TAHUN 2016

2
KOMITMEN
RENCANA AKSI



Melalui Smart City,
untuk revolusi layanan public.



Sabilulungan,
Pengelolaan Dana Bansos dan
Hibah online dimana warga
dapat mengakses secara mudah
informasinya, realisasi updatenya dan
dapat mengawasi secara realtime.

AUSTRALIA



PEMERINTAH DAERAH
INDONESIA
YANG MENERAPKAN OGP

PEMERINTAH
KOTA
**BANDA
ACEH**

BERGABUNG DALAM INISIATIF OGP
PADA TAHUN 2016



Memperbaiki pengelolaan data
sebagai langkah awal menuju
pemerintahan terbuka



Open Data Kampung,
pengelolaan akuntabilitas
Dana Desa melalui unggah
informasi di website



Jakarta berinovasi demi
menuju ke pemerintahan yang
transparan dan akuntabel.

PEMERINTAH DAERAH
INDONESIA
YANG MENERAPKAN OGP

PEMERINTAH
PROVINSI
**DKI
JAKARTA**

BERGABUNG DALAM INISIATIF OGP
PADA TAHUN 2014

RENCANA AKSI
"TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS –
JAKARTA SMART
CITY"



Open data
melalui Jakarta Smart City



E-Aset
untuk Penertiban Pencatatan
Aset DKI



"Qlue"
Mekanisme Komplain
Layanan Publik yang
terintegrasi dan Responsif



**Transparansi dokumen
APBD** yang update dan terinci



E-Musrenbang,
warga dapat mengakses
secara mudah

Expression on Interest (EoI) OGP Local



OPEN
GOVERNMENT
INDONESIA

OGP Local

- OGP Local merupakan sebuah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan CSO untuk berkolaborasi dalam mengembangkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah di tingkat subnasional atau lokal.
- Sejak dimulai pada tahun 2016, sudah ada 20 pemerintah daerah (kota/kabupaten/provinsi) diseluruh dunia yang menjadi anggota OGP Local.
- Pada tahun 2020, OGP memutuskan untuk memperluas keanggotaan OGP Local dengan membuka pendaftaran bagi 50 calon anggota OGP Local.
- Saat ini OGP sedang membuka Expression of Interest (Eoi) bagi pemerintah daerah dan mitra CSO yang berminat bergabung dengan OGP Local. Periode Eoi dibuka dari **1 Juni 2020** hingga **17 Juli 2020**.

Manfaat OGP Local

Pemerintah Daerah dalam OGP Local:

- Dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah.
- Akses ke komunitas internasional untuk “*showcase*” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain.
- Kesempatan mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.

CSO dalam OGP Local:

- Kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sektor masing-masing melalui mekanisme OGP Local.
- Akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional.
- Dukungan langsung dari OGP serupa dengan pemerintah.

Tahapan – Local OGP

1. Pemerintah daerah dan mitra CSO mengirimkan Expression of Interest (Eoi) melalui *online form* yang tersedia di website OGP hingga tanggal **17 Juli 2020 diperpanjang sampai dengan 14 Agustus 2020**.
2. OGP menghubungi *point of contact* (PoC) dan *Multi-Stakeholder Forum* (MSF) di negara yang bersangkutan untuk terlibat dalam seleksi awal.
3. OGP akan mengundang pemerintah daerah yang telah lolos seleksi awal untuk mengirimkan aplikasi lanjutan (Full Application) hingga tanggal **27 Agustus 2020**.
4. Selection Committee yang terdiri dari anggota SC dan perwakilan CSO bertanggungjawab untuk melakukan penilaian mulai dari fase Eoi hingga Full Application.
5. Keterangan lebih lanjut mengenai pendaftaran OGP Local dapat diakses melalui <https://www.opengovpartnership.org/documents/join-ogp-local-call-for-expressions-of-interest-may-2020/>

Kriteria

1. Rekam jejak pada pemerintahan terbuka atau penciptaan bersama dengan pemangku kepentingan non-pemerintah, setidaknya satu reformasi atau contoh sukses dalam ko-kreasi layanan public.
2. Visi ambisius dalam penciptaan pemerintah daerah yang terbuka dengan prinsip-prinsip OGP / Komitmen Kepala Daerah
3. Kapasitas dan sumber daya untuk ko-kreasi dan implementasi (modalitas yang sudah dimiliki)
4. Manfaat langsung bagi perbaikan layanan public di pemerintah daerah dalam keikutsertaan OGP
5. Waktu yang memadai dalam jangka waktu sisa pemerintahan saat ini (idealnya 12 – 18 bulan sisa periode yang ada).

Apa yang harus disiapkan ?

1. Menyiapkan EoI bersama dengan mitra CSO
2. Mengidentifikasi modalitas yang sudah dimiliki
3. Mengidentifikasi rencana pengembangan praktik baik yang berkaitan dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi dan inklusifitas.
4. Pemerintah Daerah dan CSO mitra melakukan pengisian form online pada aplikasi yang tersedia dengan mendiskusikan terlebih dahulu karena harus memberikan informasi yang sama :
 - Alasan minat bergabung dengan Local OGP – max. 2000 karakter
 - Rekam jejak pada pemerintahan terbuka atau penciptaan bersama dengan pemangku kepentingan non-pemerintah, setidaknya satu reformasi atau contoh sukses dalam ko-kreasi layanan public dalam 3 tahun terakhir – max. 2000 karakter.
 - Menjelaskan secara singkat kapasitas dan sumber daya untuk pembuatan bersama dan implementasi rencana aksi OGP - max. 2000 karakter
 - Manfaat langsung bagi perbaikan layanan public di pemerintah daerah dalam keikutsertaan OGP – max. 2000 karakter

- **empowering citizens with information they can use**

- **rate public services.**

1

2

Open
Government
Partnership

3

4

- **shape policies that you care about.**

- **open government for all, including the voices of those traditionally excluded**



Sekretariat CSO – Open Government Partnership Indonesia :

